

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat.

2.1.1 Pajak

Menurut Rahayu (2017), pajak merupakan iuran yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang dan tidak menerima imbalan secara langsung. Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara. Menurut Riftiasari (2019), pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, pengelolaan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, pajak merupakan pungutan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi attau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarah bagi kemakmuran rakyat.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2018), ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin dalam melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.1.1.2 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), jenis pajak yang terdapat di Indonesia yaitu:

1. Pajak Penghasilan (Pph)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.1.1.3 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Atarwaman (2020) terdapat beberapa indikator persesi penerimaan pajak yaitu :

1. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan negara.
2. Sumber utama penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak.
3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.
4. Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan.

2.1.2 Teori Keynesian (Kebijakan Fiskal dan Moneter)

Menurut teori Keynesian, pemerintah dapat mengelola ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara. Keynes, J. M. dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936), menjelaskan bahwa perubahan kebijakan moneter dapat mendorong atau menghambat investasi, yang kemudian berdampak pada pendapatan negara melalui pajak. Lebih lanjut, kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas ekonomi akan menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan meningkatkan basis pajak negara.

Teori Keynes dipakai sebagai acuan dalam investasi dan banyak dipakai dibandingkan dengan teori yang lainnya. Teori Keynes berpendapat bahwa jumlah investasi tidak bergantung pada pengembalian akan tetapi dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat suku bunga dan inflasi, jadi tidak hanya dipengaruhi oleh satu

variabel saja melainkan beberapa variabel yang harus dipertimbangkan dalam melakukan investasi. Pada teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro yang mempengaruhi perilaku individu berbeda dengan teori ekonomi klasik yang didasari dengan pengembangan keluaran potensial Keynes (1936).

2.1.3 Ekspor

Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dan dijual kepada pembeli di negara lain. Ekspor membentuk perdagangan internasional. Ekspor sangat penting bagi ekonomi modern karena menawarkan lebih banyak pasar kepada orang dan perusahaan untuk barang-barang mereka. Salah satu fungsi inti diplomasi dan politik luar negeri antara pemerintah adalah untuk mendorong perdagangan ekonomi, mendorong ekspor dan impor untuk kepentingan semua pihak perdagangan.

Barang ekspor merupakan keuntungan bagi ekonomi suatu negara. Keuntungan tersebut akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di negara pengekspor. Rahmaddi (2017), menjelaskan bahwa pentingnya peranan ekspor terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, hal ini karena ekspor mampu menghasilkan devisa bagi Indonesia. Peran pemerintah untuk meningkatkan peran ekspor dalam mendatangkan devisa yaitu pemerintah harus bekerjasama dengan para eksportir.

Pemerintah berperan mendorong pendapatan dengan cara menciptakan sektor ekspor yang dapat bersaing dengan produk ekspor dari negara lain, sedangkan para eksportir memiliki peran di dalam mencari dan meningkatkan pasar untuk produk ekspor.

2.1.3.1 Manfaat Ekspor

Kegiatan ekspor membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut ini beberapa manfaat kegiatan ekspor (Rahmaddi, 2017):

1. Dapat Memperluas pasar bagi produk ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri.
2. Dapat Menambah devisa Negara, dengan cara menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Dengan demikian dapat menambah permintaan devisa negara.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor

Beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dibidang perdagangan luar negeri.
2. Keadaan pasar diluar negeri dan dalam negeri.
3. Kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar.

2.1.4 Investasi

Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai.

Menurut (Wardiyah, 2017) Investasi adalah penempatan uang atau dana, dengan bertujuan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan yang didapatkan berupa dana tersebut. Investasi mempunyai dua sisi yaitu return dan risiko. Dalam investasi berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor.

Menurut Suyanti & Hadi (2019) Investasi adalah suatu keinginan tentang bagaimana cara menggunakan sebagian dana yang ada atau sumberdaya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang besar di masa depan. Sedangkan menurut Laopodis (2021), investasi adalah pengorbanan sumber daya (waktu, uang, dan usaha) hari ini dengan harapan mendapatkan lebih banyak sumber daya dikemudian hari.

Berdasarkan pemaparan di atas, investasi merupakan kegiatan menanamkan modal atau sumber daya dalam suatu aset atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan atau imbal hasil di masa depan.

2.1.4.1 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Jogianto (2017), jenis-jenis investasi ke dalam aset keuangan dapat berupa investasi langsung dan tidak langsung, yaitu sebagai berikut:

1. Investasi langsung (*direct investing*)

Investasi langsung adalah suatu kepemilikan surat berharga secara langsung dalam institusi atau perusahaan yang secara resmi telah go public, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen atau capital gain.

2. Investasi tidak langsung (*indirect investing*)

Investasi tidak langsung terjadi ketika surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (*investment company*) yang berfungsi sebagai perantara.

Menurut Wardiyah (2017), produk-produk investasi yang tersedia di pasar, dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

A. Investasi non fisik, yang terdiri dari:

1. Tabungan di bank
2. Deposito di bank
3. Saham
4. Reksadana
5. Mata uang asing

B. Investasi fisik, yang terdiri dari:

1. Properti
2. Barang-barang koleksi
3. Emas
4. Obligasi

2.1.4.2 Tujuan Investasi

Menurut Wardiyah (2017), secara khusus, terdapat beberapa alasan seseorang melakukan investasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang

Seseorang yang bijak akan mencari cara untuk meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang pada masa yang akan datang.

- b. Mengurangi tekanan inflasi

Dengan melakukan investasi dalam pemilihan saham perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

Melakukan dorongan untuk menghemat pajak. Di beberapa negara di dunia mendorong kegiatan investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang ingin melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

2.1.5 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mengurangi daya beli uang, sehingga konsumen harus membayar lebih untuk barang dan jasa yang sama.

Menurut Iskandar Putong (2013), inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan menurut Murni (2013), inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus.

Di sisi lain, menurut Sadono Sukirno (2016), inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang komoditi yang disebabkan tidak seimbangnya ketersediaan barang pokok dengan permintaan masyarakat.

2.1.5.1 Jenis-Jenis Inflasi

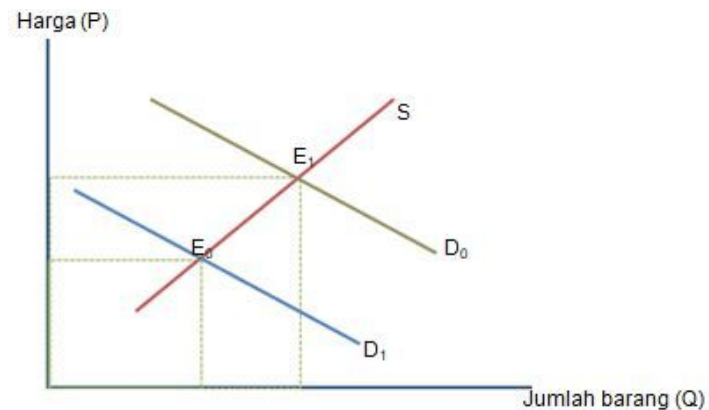
Menurut Sukirno (2016) berdasarkan tingkatannya inflasi dibedakan menjadi sebagai berikut :

- 1) Inflasi ringan, terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada dibawah angka 10% setahun.
- 2) Inflasi sedang, terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada antara 10%-30% setahun.
- 3) Inflasi berat, terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada antara 30%-100% setahun.
- 4) Hyperinflasi (inflasi tak terkendali), terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada di atas 100% setahun.

Menurut Sukirno (2016), inflasi dibedakan berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga-harga berlaku, sebagai berikut:

1. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

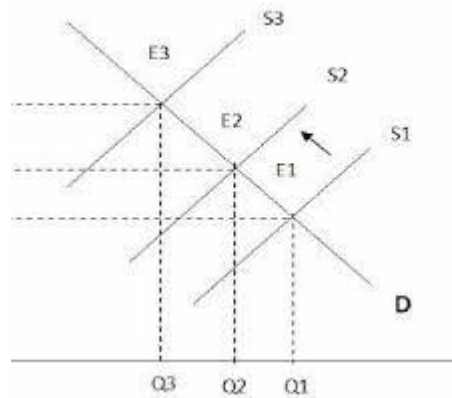


Gambar 2. 1 Grafik Inflasi Tarikan Permintaan

Sumber: Sukirno, 2016

2. Inflasi Desakan Biaya

Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.



Gambar 2. 2 Grafik Inflasi Desakan Biaya

Sumber: Sukirno, 2016

3. Inflasi Diimpor

Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran-pengeluaran perusahaan.

2.1.5.2 Indikator Inflasi

Menurut Bank Indonesia Inflasi diukur dengan IHK di Indonesia di kelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu:

- a. Kelompok bahan makanan
- b. Kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau
- c. Kelompok perumahan
- d. Kelompok sandang

- e. Kelompok kesehatan
- f. Kelompok pendidikan dan olah raga
- g. Kelompok transportasi dan komunikasi

Menurut M. Natsir (2014) rumus yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah:

$$INF_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

INF_n : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n)

IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)

IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai sumber kreativitas yang nantinya dapat membantu peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu akan memudahkan kita dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun sebuah penelitian dari segi teori dan konsep.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Puspasari, I. D. & Gazali, M., Pengaruh Keterbukaan Perdagangan, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 1990-2021, 2022	Terdapat penerimaan pajak, ekspor, dan inflasi	Terdapat variabel PMA dan pertumbuhan ekonomi	Penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi secara negatif oleh variabel keterbukaan perdagangan dan penanaman modal asing. Kemudian penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi secara positif oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi.	Jurnal EKO-Trisakti, Vol 2 No 2
2	Putri Nadia, Rayna Kartika, Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, 2020	Terdapat variabel penerimaan pajak	Terdapat variabel penagihan pajak dan penyuluhan pajak	Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.	JIUBJ
3	Agustin Adi Yuliyanti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Unilever Indonesia, Tbk, 2021	Terdapat variabel ekspor dan inflasi	Terdapat variabel suku bunga	Suku bunga dan nilai ekspor tidak berpengaruh terhadap pajak, inflasi berpengaruh terhadap pajak	JMSAB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Setiawan Junianto, Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II, 2020	Menggunakan variabel penerimaan pajak	Terdapat variabel nilai tukar dan self assessment	Suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak	JASTI
5	Siti Hadijah Ahmad, Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor KPP Makassar Utara), 2023	Menggunakan variabel inflasi dan penerimaan pajak	Terdapat variabel nilai tukar	Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dan nilai tukar berpengaruh terhadap penerimaan pajak	Jurnal Disrupsi Bisnis
6	Widya Oktaviani, Pengaruh Inflasi Dan PDB Terhadap Penerimaan PPN Di Indonesia Tahun 1992- 2022, 2024	Menggunakan variabel inflasi dan penerimaan pajak	Terdapat variabel PDB	Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, PDB berpengaruh terhadap penerimaan pajak	Jurnal EK & BI
7	Rahmadani, Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Ekspor Sebagai Variabel Mediasi, 2024	Menggunakan variabel penerimaan pajak, inflasi, dan ekspor	Terdapat variabel nilai tukar dan tingkat suku bunga	Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, namun nilai tukar dan ekspor memiliki pengaruh.	JEKPEND

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Nadhiya Rahma Rustian, Pengaruh Pendapatan Nasional, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Negara Tahun 2008-2022, 2023	Menggunakan variabel inflasi, suku bunga, dan penerimaan pajak	Terdapat variabel pendapatan nasional	PDB berpengaruh terhadap penerimaan pajak, inflasi, PDB, dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak	Mufakat
9	Randy Al Safassi, Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Fluktuasi Kurs Dollar AS, Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, 2010	Menggunakan variabel inflasi dan penerimaan pajak	Terdapat variabel fluktuasi kurs dollar AS	Suku bunga, kurs dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak	FEB UIN
10	Yeni Sapridawati, Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, 2021	Menggunakan variabel inflasi dan penerimaan pajak	Terdapat variabel nilai tukar rupiah	Inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak	Ejournal UIN Suska
11	Woro Utari, Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, 2023	Menggunakan variabel inflasi, investasi, dan penerimaan pajak	Menggunakan PDB, dan kurs	Inflasi, investasi, tingkat suku bunga, dan kurs berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak	Jurnal Trunojoyo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Ai Sumidartini, Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak, 2017	Menggunakan variabel penerimaan pajak, inflasi, dan investasi	Menggunakan variabel nilai tukar rupiah	Tingkat nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak secara parsial dan simultan.	TRANS PARANSI
13	Nur Fitri, Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar, 2020	Menggunakan variabel inflasi dan penerimaan pajak	Menggunakan variabel nilai tukar rupiah	Nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh signifikan	Paradoks
14	Novita Meita, Pengaruh Perubahan Tarif PPH Badan, Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Dan Penghasilan, 2023.	Menggunakan variabel Inflasi, dan Penerimaan Pajak.	Tidak menggunakan variabel investasi, dan ekspor.	Terdapat pengaruh signifikan erataan labantara inflasi terhadap penerimaan pajak PPh.	KIA
15	Liza Imilda Eka Rima Prasetya, Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 2021.	Menggunakan variabel biaya Inflasi, Dan Penerimaan Pajak.	Tidak menggunakan variabel Investasi.	Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	JOM

2.2 Kerangka Pemikiran

Manfaat kerangka berpikir sebagai berikut: Membantu peneliti dalam mendapatkan suatu konsep yang matang yang kemudian dimanfaatkan untuk menjelaskan setiap masalah dalam penelitian. Memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Menghubungkan setiap bagian yang ada di dalam penelitian.

2.2.1 Hubungan Ekspor dengan Penerimaan Pajak

Menurut Putri (2023), definisi ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari wilayah pabean Indonesia ke luar negeri. Ekspor merupakan salah satu bentuk perdagangan internasional yang melibatkan pengawasan Bea Cukai dan diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 serta Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah. Menurut Ramdani dan Oktavia (2024) kegiatan ekspor berkontribusi langsung terhadap penerimaan pajak negara, terutama melalui pajak ekspor yang dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Peningkatan volume ekspor biasanya diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak karena bertambahnya transaksi yang dikenai pajak. Ekspor yang meningkat juga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, yang pada gilirannya meningkatkan basis pajak secara keseluruhan.

Peningkatan kegiatan ekspor tidak hanya berdampak pada naiknya pendapatan dari luar negeri, tetapi juga mendorong aktivitas produksi dalam negeri. Semakin tinggi permintaan ekspor, semakin besar pula volume produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang kemudian meningkatkan potensi penerimaan

negara dari berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, ekspor yang kuat mencerminkan stabilitas ekonomi dan daya saing nasional, yang secara tidak langsung memperluas basis pajak dan memperkuat posisi fiskal negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hodijah dan Angelina (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan ekspor juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang memperbesar kapasitas penerimaan pajak negara dalam jangka panjang. Penelitian lain oleh Rahmawati & Hutajulu (2022) menunjukkan bahwa ekspor memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Studi lain dari Ramdani dan Oktavia (2024) menunjukkan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah (2020) dan Suprianingtias & Suharto (2019) berarti, ekspor tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak karena pemerintah menggunakan anggaran negara untuk memberikan insentif kepada produk ekspor. Insentif fiskal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar internasional, sehingga beban pajak bagi pelaku usaha ekspor dapat berkurang atau bahkan dibebaskan dalam beberapa kasus. Akibatnya, meskipun volume ekspor meningkat, penerimaan pajak dari sektor ini tidak meningkat secara signifikan karena adanya kebijakan insentif yang mengurangi kewajiban perpajakan para eksportir.

Berdasarkan penjelasan tersebut Hubungan antara ekspor dan penerimaan pajak merupakan aspek penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Peningkatan ekspor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara, baik secara langsung melalui pajak ekspor maupun secara tidak langsung melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi domestik..

2.2.2 Hubungan Investasi Dengan Penerimaan Pajak

Pada teori Multiplikator Fiskal investasi akan memicu efek berantai dalam perekonomian melalui peningkatan konsumsi, produksi, dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat investasi akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi, yang kemudian dikenakan pajak (seperti pajak penghasilan dan pajak konsumsi), sehingga penerimaan pajak meningkat secara positif. Investasi yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak karena mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbesar laba perusahaan, dan meningkatkan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pajak seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari (2023) dan Imilda (2021), dimana penambahan barang investasi mampu merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan output potensial. Dengan adanya hal tersebut, maka kesejahteraan akan turut meningkat dan pada akhirnya naiknya penerimaan pajak yang diterima.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi, M. R. (2024) dan Puspasari (2022). variabel investasi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan atau bahkan negatif terhadap penerimaan pajak. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika investor melakukan penjualan atas aset yang telah diinvestasikan sebelumnya (*divestasi*), sehingga aliran modal bersifat keluar (*capital outflow*) dan bukan menambah penerimaan negara. Selain itu, bisa jadi pemasukan dari perusahaan yang menerima investasi asing lebih kecil dibandingkan dengan total nilai investasi, sehingga tidak menghasilkan kontribusi signifikan terhadap basis pajak. Kemungkinan lainnya adalah ketika dividen yang dibayarkan kepada investor asing lebih besar daripada laba bersih yang tercatat oleh perusahaan dalam periode tertentu, sehingga tidak tercipta nilai tambah yang dapat dikenakan pajak. Dengan demikian, meskipun secara teori investasi seharusnya meningkatkan aktivitas ekonomi dan basis penerimaan pajak, dalam praktiknya dampaknya bisa bervariasi tergantung pada konteks ekonomi, bentuk investasi, serta efektivitas kebijakan fiskal dan insentif pajak yang berlaku selama periode tersebut.

Investasi mampu meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia secara positif, karena dukungan dari investasi yang tinggi mampu meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia melalui pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan indikator pajak lainnya.

2.2.3 Hubungan Inflasi Dengan Penerimaan Pajak

Menurut Sadono Sukirno (2016) bahwa dalam perspektif teori Keynesian, penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Keynes, ketika perekonomian mengalami ekspansi, terjadi peningkatan pendapatan nasional, konsumsi, dan investasi, yang secara langsung akan memperbesar basis pajak negara. Dalam kondisi ini, penerimaan pajak akan meningkat tanpa perlu menaikkan tarif pajak, karena volume transaksi ekonomi yang dikenakan pajak turut naik. Sebaliknya, dalam masa resesi, penerimaan pajak cenderung menurun karena melemahnya pendapatan masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, menurut teori Keynesian, penerimaan pajak bersifat pro-siklis, artinya akan meningkat saat ekonomi tumbuh dan menurun saat ekonomi melemah.

Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi penerimaan pajak dengan cara meningkatkan proporsi pengenaan pajak pada barang atau jasa yang digunakan masyarakat dan perusahaan.

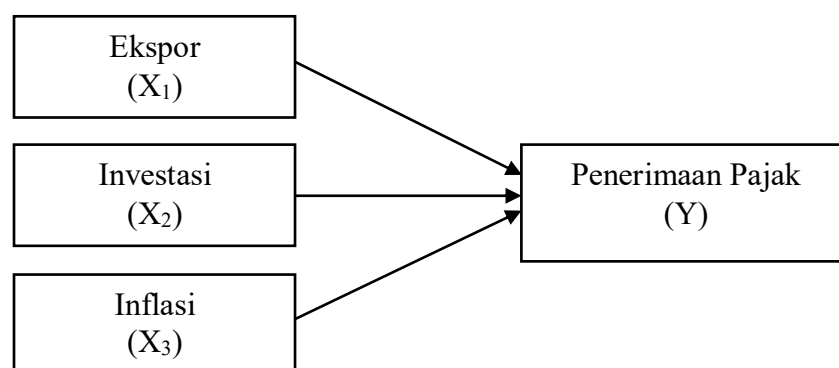
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imilda (2021) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan pada penerimaan pajak. Menurut Meita (2023) inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan menurut Fitri (2020) inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Namun dalam penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Luciana, & Ngadiman. (2021), dan yang mengatakan bahwa inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu

yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Dalam konteks perpajakan, inflasi berpotensi menurunkan penerimaan pajak karena daya beli yang menurun menyebabkan konsumsi dan aktivitas ekonomi menjadi lesu, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan tetap. Luciana dan Ngadiman (2021) dan Hartono, T. R. (2019) menyatakan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, karena masyarakat berpenghasilan rendah cenderung kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya ketika harga barang meningkat namun penghasilan tidak ikut naik. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan tinggi relatif tidak terlalu terdampak oleh inflasi.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa inflasi yang tinggi akan meningkatkan peningkatan pajak melalui pembelian beberapa barang-barang, karena harga yang dikenakan semakin tinggi, maka pajak yang dikenakan akan semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya.

Dari penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, maka peneliti memiliki beberapa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diduga ekspor, investasi, dan inflasi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2004-2023
2. Diduga ekspor, investasi, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2004-2023